



SALINAN

LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);

33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
38. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
39. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
40. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
41. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7).
42. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 ((Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	599.190.772,00
1) Bagi Hasil BUM Kalurahan	Rp.	5.000.000,00
2) Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem	Rp.	151.230.738,00
3) Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp.	396.560.034,00
4) Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp.	18.000.000,00
5) Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	Rp.	13.400.000,00
6) Bangunan Milik Kalurahan	Rp.	15.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	4.115.203.867,00
1) Dana Desa	Rp.	1.371.756.000,00
2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	602.861.467,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp.	1.135.586.400,00
4) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp.	830.000.000,00
5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi / Dais	Rp.	175.000.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.719.394.639,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	2.385.613.069,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	1.841.778.272,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	338.332.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	366.604.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	146.255.952,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp.	5.078.584.293,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(359.189.654,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	369.189.654,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	359.189.654,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Baturetno.

Ditetapkan di Baturetno

Pada tanggal 29 Desember 2022

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

Diundangkan di Baturetno

Pada tanggal 29 Desember 2022

CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (9 /BATURETNO/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,


SUMARMANTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	599.190.772,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.115.203.867,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.719.394.639,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.290.064.101,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.034.853.057,00	
5.3.	Belanja Modal	1.607.411.183,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.255.952,00	
	JUMLAH BELANJA	5.078.584.293,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(359.189.654,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.189.654,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	369.189.654,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	359.189.654,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

LURAH

TTD

SARJAKA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	599.190.772,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.115.203.867,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.719.394.639,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.385.613.069,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.829.311.658,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.306.160,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.306.160,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	559.668.384,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	559.668.384,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.145.198,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	60.145.198,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	409.597.557,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.597.557,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	101.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	101.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	34.675.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.675.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.200.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.775.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	14.368.596,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	14.368.596,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	11.760.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	77.528.192,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	77.528.192,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan B amuskal	17.982.900,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	17.982.900,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	113.990.651,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	113.990.651,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	274.274.020,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	274.274.020,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	218.530.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.530.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.530.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	150.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	52.330.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.600.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.150.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber day a pembanguana Kalurahan	18.480.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	220.887.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.655.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.655.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	54.060.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.060.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.230.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.230.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.940.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.940.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	18.800.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	12.310.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.310.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.640.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	34.512.500,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.512.500,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	4.540.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	64.553.911,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanian)	22.223.911,00	DLL, PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	9.683.911,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42.330.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.330.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.841.778.272,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	182.925.272,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.890.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	134.110.272,00	BMP, DDS, SDD
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.520.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	76.590.272,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.580.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27.945.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.945.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	551.167.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.520.000,00	BMP, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.520.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	74.830.000,00	BMP, DDS, PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.830.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.920.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.920.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.190.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	243.050.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.050.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	8.700.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.210.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	6.390.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21.460.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.460.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	21.460.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.460.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	30.437.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.437.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	642.423.215,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	52.476.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	52.476.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	195.300.000,00	DDS, PBK, PMK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	195.300.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	364.647.215,00	DDS, PAD, PBH, I
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	363.597.215,00	
2.3.91		Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	30.000.000,00	PAD
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.960.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	38.960.000,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.960.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	140.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140.000.000,00	PMK
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	286.302.285,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	23.955.000,00	PBH
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.955.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	239.462.785,00	DDS, PBK
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	239.462.785,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	22.884.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.884.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>338.332.500,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.137.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.400.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18.160.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17.415.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.415.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	9.162.500,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.162.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.070.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	35.950.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	600.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.2.93		Pengembangan Desa Budaya	11.520.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	107.237.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.100.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	79.927.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	79.927.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.210.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.210.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	115.888.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	45.730.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.730.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	45.558.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.558.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.600.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>366.604.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	290.117.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	195.330.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	195.330.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	79.743.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.743.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.044.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.044.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	56.732.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.157.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.157.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	34.710.000,00	BMP, DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.710.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.490.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	2.375.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.755.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	19.755.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.755.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>146.255.952,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.255.952,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.255.952,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.255.952,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	144.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.078.584.293,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(359.189.654,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	369.189.654,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	359.189.654,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

LURAH

TTD

SARJAKA